

**EVALUASI PENGELOLAAN DESA WISATA AMADANOM  
DESA AMADANOM, KECAMATAN DAMPIT  
KABUPATEN MALANG**

***AMADANOM ECOTOURISM MANAGEMENT EVALUATION STUDY  
AMADANOM VILLAGE, DAMPIT DISTRICT MALANG REGENCY***

**Wedi Intan Baru Widjaya<sup>1</sup>, Maria Christina E.<sup>2</sup>, Annissa Hamidah I.<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>*Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, Kampus 1 ITN Malang, Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2, Kota Malang 65145, Indonesia*

Email: [wediintan89@gmail.com](mailto:wediintan89@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Sustainable tourism village management requires a comprehensive evaluation, especially in potential areas such as Amadanom Village, Dampit District, Malang Regency. This study aims to evaluate the management of Amadanom Tourism Village by identifying key issues, analyzing inhibiting factors, and assessing management performance using the CIPP (Context, Input, Process, Product) Model. The research method used was descriptive qualitative, collecting primary data through field observations, interviews, and questionnaires, as well as secondary data from related planning documents. The results indicate that in terms of context, the potential for natural and cultural tourism attractions is high, but strategic planning has not been integrated. Regarding input, human resource capacity is limited, supporting facilities are inadequate, and the management institution is not yet formalized. In terms of process, management is participatory but lacks SOPs and effective promotional strategies. Regarding products, the economic benefits generated are still limited and have not significantly contributed to village income. Key inhibiting factors include limited infrastructure, weak institutional coordination, and low community participation. The study recommends strengthening local institutional capacity, improving basic infrastructure, and implementing digital and community-based promotional strategies to create a sustainable and competitive tourism village.*

**Keywords** : *Tourist Village, CIPP Model, Evaluation*

**ABSTRAK**

Pengelolaan Desa Wisata yang berkelanjutan memerlukan evaluasi menyeluruh, terutama pada kawasan potensial seperti Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan Desa Wisata Amadanom dengan mengidentifikasi permasalahan utama, menganalisis faktor penghambat, dan menilai kinerja pengelolaan menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder dari dokumen perencanaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konteks, potensi daya tarik wisata alam dan budaya tinggi, namun perencanaan strategis belum terintegrasi. Pada masukan, kapasitas SDM terbatas, fasilitas pendukung belum memadai, dan kelembagaan pengelola belum formal. Pada proses, pengelolaan bersifat partisipatif namun belum memiliki SOP dan strategi promosi yang efektif. Pada produk, manfaat ekonomi yang dihasilkan masih terbatas dan belum signifikan terhadap pendapatan desa. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur, koordinasi kelembagaan yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan infrastruktur dasar, serta penerapan strategi promosi berbasis digital dan komunitas untuk mewujudkan Desa Wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

**Kata Kunci** : *Desa Wisata, Model CIPP, Evaluasi*

---

**PENDAHULUAN**

Desa Wisata merupakan bentuk pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Berbeda dengan wisata konvensional yang berorientasi pada eksploitasi daya tarik alam, Desa

Wisata mengintegrasikan aspek konservasi, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem pengelolaan yang berbasis komunitas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Desa Wisata menjadi alternatif strategis untuk mengembangkan potensi pedesaan tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem dan kearifan lokal.

Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Dampit, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pengembangan desa wisata. Desa Amadanom, yang terletak di kecamatan ini, menawarkan kekayaan alam berupa pemandangan pegunungan, hutan, serta keanekaragaman flora dan fauna. Udara yang sejuk dan suasana pedesaan yang asri menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata berbasis alam. Selain itu, Desa Amadanom memiliki potensi kearifan lokal yang meliputi tradisi tani organik, pengolahan hasil bumi, dan kerajinan tradisional. Pemerintah Kabupaten Malang, melalui program *Malang Tourism Development* yang diluncurkan pada 2019, telah mencanangkan pengembangan desa wisata, dengan Desa Amadanom termasuk dalam prioritas kawasan wisata berbasis alam dan budaya.

Sebagai destinasi desa wisata, Desa Amadanom memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangannya. Keindahan alam yang alami dan 1 keanekaragaman hayati menjadi salah satu aset utama. Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang memiliki nilai konservasi tinggi. Selain itu, aktivitas berbasis masyarakat, seperti budidaya tanaman organik dan seni kerajinan tangan, memberikan daya tarik budaya yang unik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya pada 2021, ekowisata berbasis komunitas di wilayah Malang menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat hingga 40% dibandingkan desa non-wisata, menandakan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Amadanom.

Meskipun potensi Desa Amadanom cukup besar, pengembangannya menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan desa wisata yang berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum terstruktur dan terformalnya kelembagaan pengelola, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya inovasi produk dan strategi promosi, serta minimnya infrastruktur wisata yang memadai menjadi tantangan utama. Selain itu, tekanan terhadap lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang kurang terkontrol turut mengancam keberlanjutan destinasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap sistem pengelolaan Desa Wisata Amadanom. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai kondisi awal, kesiapan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, dan hasil pengelolaan. Evaluasi juga dikaitkan dengan konsep 5A guna mengukur daya saing destinasi secara lebih objektif. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh serta rekomendasi strategis dalam mendukung

pengembangan Desa Wisata Amadanom yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Evaluasi

Evaluasi adalah aspek krusial dalam siklus perencanaan dan kebijakan pembangunan, termasuk dalam manajemen ekowisata. Dalam konteks ini, penilaian berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu program atau kegiatan pariwisata berbasis alam.

Dalam penelitian desa wisata, analisis tidak hanya menilai hasil akhir (output dan outcome), tetapi juga proses keterlibatan masyarakat, pengaruh sosial ekonomi, dan sumbangan terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu metode yang penting dalam menilai program pengelolaan desa wisata adalah Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diciptakan oleh Stufflebeam. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dalam mengevaluasi konteks kebijakan, sumber daya yang ada, mekanisme implementasi, serta hasil-hasil yang diperoleh dari program desa wisata.

Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.

Menurut Stufflebeam, evaluasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang membantu pengambil keputusan dalam menilai nilai (value) suatu program. Dengan menggunakan pendekatan CIPP Model (Context, Input, Process, Product), ia menekankan pentingnya pengumpulan data yang objektif dan sistematis. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi berbagai aspek program secara menyeluruh, dari konteks perencanaan hingga hasil akhir. (Stufflebeam, D.L., 2003)

Tujuan evaluasi dapat bervariasi tergantung pada jenis program atau kebijakan yang dinilai, tetapi secara umum, evaluasi memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menilai Efektivitas Program
2. Mengidentifikasi kelemahan dan masalah.
3. Memberikan umpan balik dan perbaikan
4. Menyediakan informasi untuk akuntabilitas

### B. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan terorganisir yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Pengelolaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik organisasi, sumber daya, maupun program pembangunan.

Pengelolaan (manajemen) merupakan suatu proses yang sistematis, terorganisir, dan

berkesinambungan dalam mengatur sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga pelaksanaan tindakan strategis melalui serangkaian fungsi utama. *Coping Capacity* (Kapasitas Penanganan).

Menurut Koontz dan Weihrich (2010), pengelolaan adalah proses menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan individu bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan desa wisata sebagai suatu sistem memerlukan penerapan fungsi fungsi manajemen yang terstruktur dan terpadu. Menurut George R. Terry (1972), unsur manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan atau pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat unsur ini sering disingkat sebagai POAC dan berfungsi sebagai kerangka dasar dalam mengelola suatu organisasi atau program pembangunan, termasuk ekowisata.

Penerapan unsur-unsur manajemen ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, fungsi manajemen juga menjadi alat untuk menjaga kesinambungan antara pelestarian alam, pelibatan masyarakat, dan pencapaian manfaat ekonomi lokal.

### C. Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk rural tourism yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi serta menjaga keautentikan lanskap, budaya, dan praktik hidup setempat. Dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan, desa wisata dipandang sebagai instrumen sustainable rural development yang mengintegrasikan pelestarian sumber daya, pemberdayaan komunitas, dan penciptaan manfaat ekonomi yang inklusif (UNWTO, 2021). Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata harus memperkuat fungsi sosial-ekonomi desa tanpa mengurangi integritas lingkungan dan nilai budaya lokal.

Secara konseptual, karakteristik utama desa wisata meliputi autentisitas, berbasis komunitas (Community-Based Tourism/CBT), keberlanjutan, pengalaman partisipatif, dan kapasitas kelembagaan (UNWTO, 2021). Autentisitas menekankan keunikan sumber daya lokal sebagai inti daya tarik destinasi, sementara pendekatan CBT memastikan masyarakat terlibat sebagai perencana, pengelola, dan penerima manfaat (Goodwin & Santilli, 2009). Keberlanjutan menuntut keseimbangan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi (Swarbrooke, 1999), yang diperkuat melalui tata kelola dan kelembagaan formal seperti pokdarwis atau badan pengelola desa wisata.

Dalam evaluasi destinasi pedesaan, UNWTO (2021) merekomendasikan komponen daya saing

5A, yaitu Attractions, Accessibility, Amenities, Ancillary Services, dan Awareness. Kerangka ini menilai kualitas atraksi yang otentik, kemudahan akses fisik dan informasi, ketersediaan fasilitas sesuai standar mutu dan keselamatan, efektivitas kelembagaan pendukung, serta konsistensi promosi. Dengan parameter tersebut, desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

### D. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Model CIPP adalah salah satu model evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada tahun 1971, dan menjadi pendekatan komprehensif dalam menilai efektivitas suatu program secara menyeluruh. CIPP sendiri merupakan singkatan dari Context (Konteks), Input (Masukan), Process (Proses), dan Product (Produk). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi program yang bersifat partisipatif, berbasis masyarakat, dan bertujuan jangka panjang—sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas seperti di Desa Amadanom. Dalam kerangka Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), model ini mendukung prinsip keberlanjutan, partisipasi, dan perencanaan spasial yang berorientasi hasil.

Komponen konteks menilai kebutuhan, peluang, dan permasalahan yang melandasi pelaksanaan program. Dalam desa wisata, evaluasi konteks melihat latar belakang geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang berlaku. Pada kasus Desa Amadanom, konteks mencakup potensi alam seperti sungai, hutan, dan udara pegunungan, serta permasalahan rendahnya pendapatan warga dan ketimpangan pembangunan desa.

Komponen input mengevaluasi perencanaan dan sumber daya yang digunakan. Ini mencakup:

- Kelembagaan (misalnya Pokdarwis)
- Anggaran (swadaya atau dana desa)
- Fasilitas dasar wisata (toilet, mushola, papan informasi)
- Sumber daya manusia (keterampilan, pelatihan)
- Dukungan kebijakan (SNI 8013:2014 dan Permenparekraf No. 9/2021)

Di Desa Amadanom, input yang ada seperti Pokdarwis dan fasilitas sudah mulai terbentuk, namun belum memiliki legalitas dan sistem kerja formal, belum ada pelatihan, serta tidak tersedia dokumen Input

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengembangan desa wisata di Desa Amadanom,

Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik pengembangan desa wisata yang sangat bergantung pada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang bersifat dinamis (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif masyarakat setempat dan berbagai pihak terkait dalam pengembangan ekowisata (Denzin & Lincoln, 2011).

Teknik Pengambilan Sampel Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang representatif dari populasi sasaran di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dan keterbatasan waktu serta sumber daya, maka peneliti tidak melakukan survei terhadap seluruh populasi, melainkan mengambil sebagian sebagai sampel.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Desa Amadanom, jumlah total penduduk desa pada tahun 2024 adalah 1.836 jiwa. Untuk menentukan ukuran sampel yang mewakili populasi tersebut secara proporsional, digunakan rumus Slovin, yaitu suatu rumus statistik yang berguna untuk menentukan jumlah sampel dari populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Rumus ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan karena kepraktisannya dalam menentukan batas toleransi kesalahan (*margin of error*).

Berikut adalah rumus Slovin yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel 44
- N = Jumlah populasi (1.836 orang)
- e = Tingkat kesalahan (*error tolerance*), dalam hal ini ditetapkan sebesar 10% atau 0,1

Dengan memasukkan angka ke dalam rumus:

$$n = \frac{1836}{1 + 1836(0,1)^2} = \frac{1836}{1 + 1836(0,01)} = \frac{1836}{1 + 18,36} = \frac{1836}{19,36} \approx 94,85$$

Hasil perhitungan tersebut dibulatkan ke atas menjadi 95 responden sebagai jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah ini dianggap telah mencukupi untuk menggambarkan persepsi dan kondisi di lapangan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik, dengan tingkat kepercayaan sekitar 90%.

## GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Amadanom merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan mata pencaharian masyarakat dominan pada sektor pertanian. Desa

Amadanom secara topografi berada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 200 meter hingga 600 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tersebut sangat cocok untuk budidaya perkebunan seperti kopi dan singkong, dan untuk budidaya pertanian seperti tanaman padi dan jagung.

Desa Amadanom terdiri atas 3 dusun, yaitu Amadanom Selatan (dekat jalan nasional), Amadanom tengah, dan Banjarpatoman (paling utara). Semakin ke utara keadaan topografi Desa Amadanom semakin tinggi, sedangkan semakin ke selatan kondisi topografis rendah.

- Sebelah Utara: Berbatasan Desa Majangtengah dan Desa Summersuko.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Pamotan.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Sukodono.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Pojok.

Desa Amadanom memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata tahunan sekitar 2.500–3.000 mm, menjadikan wilayah ini subur untuk kegiatan pertanian organik, termasuk budidaya kopi, hortikultura, dan padi ladang. Vegetasi alami yang tumbuh meliputi pohon pinus, bambu, kopi robusta, dan tanaman tahunan lain. Semua ini menjadi bagian dari daya tarik wisata alam yang dapat dikembangkan.

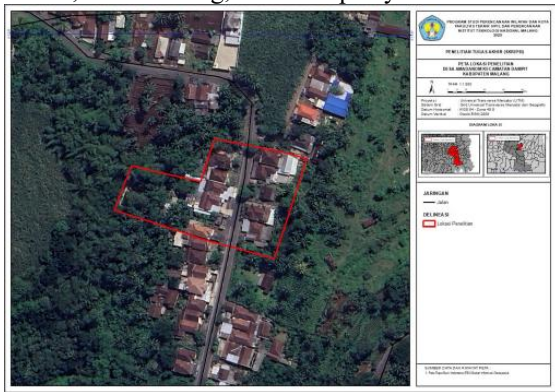
### B. Lokasi Desa Wisata Amadanom

Desa Wisata Amadanom terletak di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kawasan ini berjarak sekitar 38 km dari pusat Kota Malang dan dapat ditempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam perjalanan darat. Desa Amadanom berada pada ketinggian antara 800 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut dan berada di wilayah yang dikelilingi oleh perbukitan serta hutan tropis yang masih relatif alami. Letaknya yang berada di jalur pendakian Gunung Semeru menjadikan kawasan ini sebagai titik transit dan area alternatif untuk wisatawan yang menghindari rute padat.

Ruang wisata yang mencakup kurang dari 3% dari total wilayah desa ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata di Amadanom masih pada skala terbatas. Namun, hal ini justru selaras dengan prinsip penetapan kawasan desa wisata sebagaimana tercantum dalam SNI 8013:2014, yang menekankan pentingnya konservasi ruang, keterlibatan masyarakat, dan kesinambungan fungsi ekologis desa. Standar tersebut tidak mewajibkan penguasaan lahan wisata dalam proporsi besar, melainkan mendorong optimalisasi fungsi ruang yang ada sesuai karakter lokal.

Adapun lokasi wisata ini sebagian besar berada di lahan milik masyarakat dan hutan rakyat yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Posisi ruang wisata yang tersebar di tepi dusun dan tidak mengganggu ruang budidaya utama menjadikan pengelolaan dapat dijalankan secara adaptif. Namun

demikian, belum terdapat dokumen zonasi internal desa yang mengatur secara rinci batas-batas ruang wisata, zona lindung, dan zona pelayanan wisata.

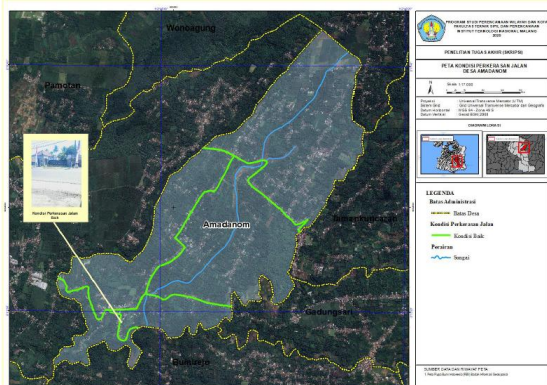


Peta 1 Lokasi Desa Wisata Amandanom

### C. Kondisi Jalan Desa Wisata Amandanom

Identifikasi tingkat persepsi risiko Kondisi jalan menuju kawasan desa wisata Amandanom pada awal pengembangan tergolong kurang memadai. Jalan utama dari Kecamatan Dampit menuju Desa Amandanom sebelumnya masih sempit, bergelombang, dan terdapat kerusakan seperti lubang serta permukaan yang belum beraspal sempurna. Pada musim hujan, kondisi jalan menjadi licin dan rawan longsor karena kurangnya sistem drainase yang memadai. Hal ini berdampak pada terbatasnya minat wisatawan serta menyulitkan distribusi barang dan akses masyarakat lokal.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan peningkatan kondisi jalan oleh pemerintah daerah melalui program pengembangan desa wisata. Jalan penghubung antar dusun dan akses utama menuju area wisata kini telah diperbaiki dan diperkeras dengan lapisan aspal maupun cor beton, sehingga lebih layak dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat.



Peta 2 Kondisi Perkerasan Jalan di Desa Amandanom

### D. Kondisi Fasilitas Desa Wisata Amandanom

Sesuai dengan indikator dalam SNI 8013:2014 tentang desa wisata dan SNI 9042:2021 tentang wisata alam berkelanjutan, sebuah destinasi wisata seharusnya dilengkapi dengan fasilitas dasar dan penunjang yang layak dan berfungsi baik. Hal ini mencakup toilet bersih, mushola, area parkir,

homestay standar, papan informasi, tempat istirahat, pusat informasi wisata, dan fasilitas interaksi sosial. Berdasarkan hasil observasi dan pencocokan dengan standar tersebut, kondisi fasilitas desa wisata di Desa Amandanom dapat dijelaskan sebagai berikut:

Awalnya dibangun oleh masyarakat dengan dana swadaya. Bangunan permanen ini dahulu digunakan oleh pengunjung dan warga, namun kini catnya pudar, atap bocor, dan tempat wudhu tidak layak pakai. Menurut SNI 8013:2014, mushola harus memenuhi standar sanitasi dan kenyamanan, yang saat ini belum dipenuhi. Tiga unit gazebo dibangun untuk bersantai dan menikmati panorama. Dulu dimanfaatkan untuk tempat istirahat. Kini dua unit rusak ringan di bagian lantai dan atap. Dalam SNI 9042:2021, fasilitas istirahat harus aman dan nyaman dan kondisi saat ini tidak mencukupi kriteria tersebut.

Satu toilet umum tersedia namun tidak memenuhi syarat. Tidak ada ventilasi, air kadang tidak mengalir, dan kebersihannya buruk. Dalam SNI 8013:2014 dan 9042:2021, toilet wisata harus bersih, fungsional, dan tersedia dalam jumlah memadai. Pernah ada fasilitas bermain anak seperti ayunan dan papan jungkat-jungkit. Kini sudah rusak dan tidak terpakai. Fasilitas rekreasi anak dalam SNI harus aman, rutin diperiksa, dan disertai dengan panduan penggunaannya. Area parkir di desa wisata Amandanom terletak di depan rumah warga dan menggunakan perkerasan berupa semen. Meskipun tidak lagi berupa tanah kosong seperti sebelumnya, area ini belum memiliki marka, garis pembatas, atau sistem pengelolaan yang terstruktur.



Mushola

Gazebo



Toilet Umum



Playground



Pusat Oleh-oleh



Cafe



Area Parkir

Gambar 1 Fasilitas Desa Wisata Amandanom

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2025

## E. Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata

Dalam pengelolaan pariwisata alam, keberadaan kelembagaan yang formal, fungsional, dan berbasis masyarakat merupakan elemen kunci keberlanjutan. Mengacu pada SNI 8013:2014 Bab 6.10 tentang Penataan Kelembagaan, pengelola pariwisata alam wajib memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta sistem pengelolaan yang transparan dan partisipatif.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan desa wisata di Desa Amadanom saat ini belum ditopang oleh struktur kelembagaan yang sesuai standar tersebut. Kegiatan pengelolaan masih dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat secara informal, belum terbentuk Pokdarwis resmi yang diakui dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, dan belum tersedia struktur organisasi, pembagian tugas, maupun job description yang terdokumentasi. Ketiadaan dokumen perencanaan kelembagaan, dokumen anggaran, serta dokumen SOP operasional juga menunjukkan bahwa pengelolaan masih belum berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance dalam pariwisata alam.

Berdasarkan SNI 8013:2014 Klausul 6.10, kelembagaan pengelola pariwisata alam wajib memenuhi indikator berikut:

**Tabel 1 Indikator Kelembagaan**

Indikator Kelembagaan (SNI 8013:2014)	Kondisi Eksisting
Adanya struktur organisasi atau fungsi kelembagaan pengelola	Belum tersedia secara formal
Adanya SDM dengan tugas jelas (job desk) untuk konservasi, pelayanan, dan promosi	Belum tersedia, kegiatan masih berjalan spontan dan jarang terdokumentasi
Adanya dokumen anggaran dan rencana kerja kelembagaan	Belum disusun, kegiatan belum berbasis perencanaan anggaran yang terarah
Pelibatan masyarakat lokal dalam struktur kelembagaan	Belum optimal, perwakilan masyarakat adat atau tokoh lokal belum dilibatkan
Adanya dokumen norma/sosial budaya sebagai pedoman pengelolaan	Tidak tersedia, belum ada kesesuaian kelembagaan dengan sistem sosial desa

Sumber: Sumber: SNI 8013:2014 dan hasil kajian 2025

Kondisi tersebut menandakan bahwa pengelolaan desa wisata Amadanom masih berada dalam fase inisiasi kelembagaan. Padahal, sesuai dengan prinsip kemandirian dan keberlanjutan dalam SNI, pengelolaan wisata alam harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum, kapasitas teknis, dan kemampuan menjalin kolaborasi lintas sektor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Terhadap Desa Wisata Amadanom

Tinjauan eksternal adalah bagian dalam penelitian yang membahas tentang kondisi, kebijakan maupun fenomena nyata dari luar yang berpengaruh pada lokasi penelitian.

#### Tinjauan Eksternal Menurut Kebijakan

Pengembangan desa wisata di Indonesia telah menjadi bagian integral dari arah kebijakan pembangunan nasional di bidang kepariwisataan. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

(RIPARNAS) 2010–2025, yang menempatkan desa wisata sebagai salah satu bentuk wisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, dengan mengedepankan aspek pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan identitas budaya lokal.

### Tinjauan Internal Terhadap Desa Wisata Amadanom

Secara internal, Desa Amadanom memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi desa wisata. Potensi tersebut mencakup keunggulan bentang alam perbukitan, keberadaan hutan rakyat, sungai alami, serta kebun kopi rakyat yang telah menunjukkan daya saing hingga ke pasar ekspor. Selain itu, budaya lokal yang masih terjaga, serta keterlibatan masyarakat dalam pertanian dan kegiatan adat menjadi nilai tambah dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.

Namun, berdasarkan observasi langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan pengelola, kepala desa, serta masyarakat setempat, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan implementasi pengelolaan. Beberapa persoalan utama yang ditemukan adalah:

1. Belum adanya regulasi resmi tingkat desa menjadi dasar hukum pengelolaan desa wisata, seperti Perdes desa wisata atau Perdes Tata Ruang Pariwisata.
2. Kelembagaan pengelola (Pokdarwis) belum memiliki struktur formal, SOP, dan perencanaan operasional, sehingga kegiatan wisata masih berjalan secara sporadis dan informal
3. Promosi masih bersifat pasif lebih banyak mengandalkan promosi mulut ke mulut dan media sosial pribadi, tanpa strategi promosi digital yang terintegrasi.
4. Keterbatasan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat Terutama dalam aspek guiding, hospitality, konservasi dan pengelolaan destinasi.

### B. Minat dan Kesiapan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata

Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat bergantung pada minat dan kesiapan masyarakat lokal dalam terlibat aktif sebagai pelaku sekaligus penjaga keberlanjutan kawasan wisata. Dalam konteks pengembangan desa wisata Amadanom, keterlibatan komunitas lokal, khususnya pengelola seperti Pokdarwis dan pelaku usaha berbasis desa, menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis. Oleh karena itu, dilakukan wawancara terstruktur terhadap perwakilan pengelola dan warga untuk mengetahui sejauh mana minat dan kesiapan mereka dalam mendukung desa wisata.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata tergolong tinggi, terutama karena adanya kesadaran akan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui

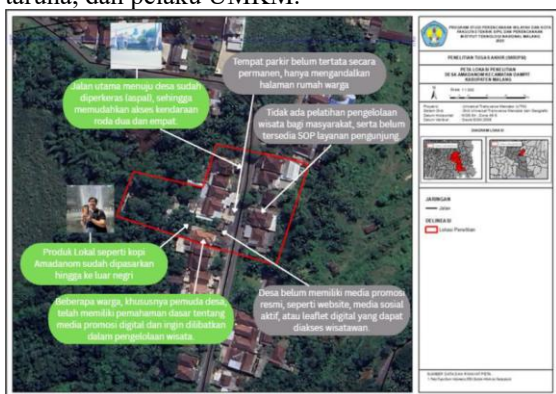
usaha homestay, kuliner, parkir, dan produk lokal. Beberapa warga bahkan telah memulai inisiatif usaha secara mandiri, meskipun masih bersifat informal.

Namun, kesiapan kelembagaan dan teknis masih terbatas. Pokdarwis yang terbentuk sejak 2021 belum memiliki legalitas formal, struktur organisasi yang fungsional, maupun rencana kerja yang terarah. Infrastruktur pendukung seperti toilet, gazebo, dan mushola juga belum memadai, sementara promosi masih mengandalkan metode konvensional tanpa pemanfaatan digital secara optimal. Meskipun demikian, terdapat kesiapan dan antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan.

Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat cukup kuat, tetapi belum didukung sistem kelembagaan dan manajemen yang terpadu. Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Badan Standardisasi Nasional dalam SNI 8013:2014 serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf No. 9 Tahun 2021) yang menekankan pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat dengan struktur kelembagaan yang jelas dan kolaboratif untuk menjamin keberlanjutan destinasi.

### C. Analisis Identifikasi Potensi dan Permasalahan Desa Wisata Amadanom

Desa Amadanom memiliki potensi kuat dalam pengembangan Desa Wisata berbasis alam dan komunitas, didukung oleh bentang alam perbukitan, sungai, kebun kopi, serta praktik pertanian organik. Keberhasilan kopi lokal yang telah menembus pasar ekspor menjadi aset strategis yang berpeluang dikembangkan sebagai agrowisata. Modal sosial juga terlihat dari keterlibatan Pokdarwis, karang taruna, dan pelaku UMKM.



Peta 3 Potensi dan Masalah Desa Wisata Amadanom

Namun, hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa meskipun konteks sumber daya alam dan sosial cukup mendukung, aspek kelembagaan dan pengelolaan masih lemah. Belum terdapat kebijakan formal, struktur organisasi, rencana kerja, maupun SOP yang jelas. Infrastruktur dasar telah tersedia

tetapi belum optimal, sementara dampak ekonomi wisata masih terbatas dan belum didukung sistem evaluasi kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan integrasi potensi lokal agar pengembangan Desa Wisata berjalan berkelanjutan.

### D. Analisis Faktor Penghambat Pengelolaan Desa Wisata Amadanom

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor kuesioner, seluruh indikator pengelolaan Desa Wisata Amadanom menunjukkan nilai yang relatif baik, meskipun terdapat variasi antar variabel. Indikator fasilitas memperoleh skor tertinggi (4,37) dengan klasifikasi sangat baik, menunjukkan bahwa ketersediaan sarana fisik seperti toilet, tempat duduk, dan fasilitas penunjang lainnya telah mendukung kenyamanan pengunjung secara optimal. Sebaliknya, indikator promosi memperoleh skor terendah (2,68) dengan klasifikasi cukup, mengindikasikan bahwa pemasaran destinasi masih belum maksimal, terutama dalam pemanfaatan media digital dan materi promosi.

Selain promosi, aspek kelembagaan juga berada pada kategori cukup (2,95), yang menunjukkan bahwa struktur organisasi, kolaborasi antar-pihak, dan profesionalitas pengelolaan masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, hambatan utama pengelolaan Desa Wisata Amadanom terletak pada aspek promosi dan kelembagaan, sementara fasilitas fisik menjadi kekuatan utama destinasi.

### E. Analisis Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Amadanom

Evaluasi pengelolaan Desa Wisata Amadanom dilakukan melalui analisis kuantitatif skor persepsi responden dan pendekatan kualitatif menggunakan model CIPP dari Daniel Stufflebeam (2003). Hasil menunjukkan bahwa indikator fasilitas memperoleh skor tertinggi (4,37) dengan kategori sangat baik, menandakan sarana fisik seperti toilet, shelter, dan area parkir telah mendukung kenyamanan wisatawan. Sebaliknya, promosi menjadi indikator terendah (2,68), menunjukkan keterbatasan strategi pemasaran, khususnya dalam pemanfaatan media digital. Kelembagaan juga berada pada kategori cukup (2,95), mencerminkan belum optimalnya struktur organisasi, legalitas formal, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan kerangka CIPP, aspek **context** menunjukkan potensi sosial-budaya yang kuat namun belum didukung regulasi formal seperti Perdes dan AD/ART Pokdarwis. Pada aspek **input**, aksesibilitas tergolong baik (3,04) dan fasilitas memadai, meskipun sebagian belum memenuhi standar mutu. Aspek **process** masih lemah karena belum terdapat SOP, rencana kerja, maupun sistem monitoring yang terstruktur, serta promosi yang masih pasif. Pada aspek **product**, daya tarik wisata dinilai baik (3,33) dan dampak ekonomi mulai dirasakan, terutama melalui UMKM dan komoditas

kopi ekspor, namun belum didukung sistem pencatatan kinerja yang terukur.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan pada aspek fisik dan ekonomi awal, pengelolaan Desa Wisata Amadanom masih memerlukan penguatan kelembagaan, strategi promosi digital, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar pengembangan destinasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Wisata Amadanom memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi berbasis masyarakat, didukung oleh bentang alam perbukitan, sungai, kebun kopi, serta kearifan lokal yang masih terjaga. Evaluasi menggunakan pendekatan CIPP menunjukkan bahwa pada aspek konteks terdapat minat dan kesiapan masyarakat yang tinggi, namun belum didukung kebijakan formal dan perencanaan yang jelas. Pada aspek input dan proses, sumber daya alam dan partisipasi masyarakat tersedia, tetapi kapasitas SDM, kelembagaan, fasilitas, serta strategi promosi masih perlu diperkuat. Sementara itu, pada aspek produk, dampak ekonomi awal sudah dirasakan, namun keberlanjutannya belum terjamin karena belum adanya sistem pengelolaan dan evaluasi yang terstruktur.

Secara keseluruhan, pengembangan Desa Wisata Amadanom memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi masyarakat, perbaikan fasilitas, serta strategi promosi dan perencanaan yang terintegrasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian mengenai Kajian Evaluasi Pengelolaan Desa Wisata Amadanom Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, berikut adalah rekomendasi yang dapat disarankan kepada akademisi dan pemerintah.

Rekomendasi untuk Akademisi

- 1 Kajian daya dukung lingkungan untuk memastikan pengelolaan wisata tidak melampaui kapasitas fisik dan sosial-ekonomi.
- 2 Pengembangan zonasi berbasis GIS guna mendukung perencanaan spasial (zona konservasi, aktivitas wisata, dan permukiman).
- 3 Studi komparatif kebijakan desa wisata di wilayah Malang Raya untuk menemukan model pengelolaan yang efektif.
- 4 Analisis kelayakan ekonomi dan investasi, termasuk *cost-benefit analysis* dan peluang kemitraan publik-swasta (PPP).

Rekomendasi untuk Pemerintah

- 1 Integrasi Desa Wisata dalam dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, RTRW) agar memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran.

- 2 Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen destinasi, pelayanan, promosi digital, dan konservasi lingkungan.
- 3 Penyusunan SOP dan standarisasi layanan untuk menjamin profesionalitas dan kualitas pengelolaan wisata.
- 4 Penguatan promosi dan branding destinasi, termasuk pengembangan identitas resmi dan strategi pemasaran digital terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNPB No 02. (2012). Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. <https://doi.org/10.29244/jitl.16.2.67-74>
- Falah, M. N. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Resiko terhadap Minat Menggunakan Kembali ShopeePay Di Kota Malang Saat Pandemi Covid-. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7272>
- Hastanti, B. (2020). Analisis Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Bandang Berdasarkan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Dan Kelembagaan Di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. *Jurnal Wasian*, 7(1), 25–38. <https://doi.org/10.20886/jwas.v7i1.4785>
- Hilmy, R. N., & Aly Sya'ban, M. B. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Risiko Banjir Di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 9(2), 306. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i2.19943>
- Karagiorgos, K., Thaler, T., Hübl, J., Maris, F., & Fuchs, S. (2016). Multi-vulnerability analysis for flash flood risk management. *Natural Hazards*, 82, 63–87. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2296-y>
- Malthuf, M. (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Sosial Penduduk Terhadap Bencana Gempabumi Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Plano Buana*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/10.36456/jpb.v3i2.7190>
- Marzuki Sinambela, dkk. (2021). Mitigasi dan Manajemen Bencana.
- Nakoe, M. R., & Lalu, N. A. S. (2022). Manajemen Bencana. [www.penerbitdutasablon.com](http://www.penerbitdutasablon.com)
- Nugrahani, P. S., & Imamah, I. N. (2024). Studi Korelasi Persepsi Risiko Bencana dengan Kesiapsiagaan Banjir pada Masyarakat di Bantaran Sungai Bengawan Solo. *ASJN (Aisyiyah Surakarta Journal of Nursing)*, 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.30787/asjn.v5i1.1510>

- Paramitha, P. P. P., Tambunan, R. P., & Indra, T. L. (2020). Kajian Pengurangan Risiko Bencana Banjir di DAS Ciliwung. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 5(2), 100–124. <https://doi.org/10.21009/ijeem.052.01>
- Puspitotanti, E., & Karmilah, M. (2021). Kajian Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20023>
- Ruddin, F., Nurhabibi, P., & Saputra, B. (2022). Persepsi Risiko Bencana Pada Mahasiswa di Kota Padang Ditinjau dari Pengalaman dan Variabel Demografis. *Jurnal Kawistara*, 12(2), 229. <https://doi.org/10.22146/kawistara.72639>
- Rufat, S., Tate, E., Burton, C. G., & Maroof, A. S. (2015). Social vulnerability to floods: Review of case studies and implications for measurement. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 470–486. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.09.013>
- Slovic, P. (2000). *The Perception of Risk*. Author. In Earthscane, Routledge.
- Soegiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sudirman, S., Ambarwati, A., & Lubis, L. (2022). Identifikasi Pengukuran Indeks Kerentanan Sosial Daerah Rentan Bencana Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 171–184. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.5125>
- Triyono, T., & Febriani, R. D. (2018). Persepsi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Terhadap Pendidikan Lanjutan. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 70–77. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v3i1.81>
- Utama Novan, Ayu Rachmawati, T., & Hadisusanto, N. (2020). Penguluran River Flood Mitigation Strategy in Gedangan and Sumbermanjing Wetan Districts, Malang Regency. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 9–17.
- Williams, B. D., & Webb, G. R. (2021). Social vulnerability and disaster: understanding the perspectives of practitioners. *Disasters*, 45(2), 278–295. <https://doi.org/10.1111/disa.12422>
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2003). At Risk Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. In *Feuillets de Radiologie* (Vol. 43, Issue 4). <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed6&NEWS=N&AN=2003372014>